



KR GROUP  
http://www.krjogja.com

EDISI PENGUMUMAN  
DAS KPU YOGYAKARTA & KLATEN

# Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN  
SCAN BARCODE



SENIN WAGE

21 AGUSTUS 2023 ( 3 SAPAR 1957 / TAHUN LXXVIII NO 310)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

## BERI OPSI MUNDUR ATAU DIPECAT PDIP Pastikan Sanksi Budiman Sudjatmiko

JAKARTA (KR) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partai mengumumkan sanksi terhadap salah satu kadernya, Budiman Sudjatmiko, Senin (21/8) hari ini. Pasalnya, Budiman mengumumkan secara terbuka mendukung bakal calon presiden dari partai lain, Prabowo Subianto.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto Kristiyanto di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Minggu (20/8).

\* Bersambung hal 7 kol 1



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

KIRAB HUT RI: Sejumlah warga Padukuhan Terwilan mengikuti kirab memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Terwilan, Margodadi, Seyegan, Sleman, Minggu (20/8/2023). Acara yang diikuti ribuan warga itu menjadi media untuk memperkuat jiwa nasionalisme serta menyemarakkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

## HASIL TEMUAN JPPR Separuh KPU Belum Umumkan DCS

MAGELANG (KR) - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan 39,6 persen dari laman KPU Kabupaten/kota yang disurvei tidak mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada hari pertama pengumuman atau 19 Agustus 2023.

Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita mengatakan, pada hari pertama pengumuman DCS, JPPR melakukan pengawasan terhadap 215 laman KPU Kabupaten/Kota atau 42 persen dari seluruh laman milik KPU Kabupaten/Kota atau 514 KPU Kabupaten/Kota.

"Dari 215 laman tersebut, yang mengumumkan di hari pertama sebanyak 130 laman atau 60,4 persen dan yang tidak mengumumkan sebanyak 85 laman atau 39,6 persen," ujar Nurlia Dian Paramita, dalam keterangan persnya, Minggu (20/8).

Ia mengemukakan, laman yang tidak mengumumkan tersebut tersebar di beberapa provinsi di antaranya Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat dan NTT. Saat melakukan pengecekan terhadap laman KPU Kabupaten/Kota yang tidak mengumumkan ditemukan laman yang tidak aktif dan terjadi kesalahan (error).

\* Bersambung hal 7 kol 1



## Analisis Keanggotaan OECD

Prof Dr Haryo Kuncoro

INDONESIA sedang menjajaki secara resmi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Kerja sama dengan OECD sejatinya sudah berjalan lama. Sejak 2007 Indonesia sudah menjadi mitra kunci OECD. Bahkan, OECD sudah memiliki kantor di Indonesia sejak 2015. Namun proposal agenda keanggotaan resmi akan digelar pada September 2023.

\* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:45	15:05	17:42	18:52	04:29

Senin, 21 Agustus 2023 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

**PROMO SPESIAL KEMERDEKAAN**

**Yuk Intip Si Kecil**  
dengan Pemeriksaan USG 4D

Estimasi: Rp 235.000

Informasi & Pendaftaran: 0811 8550 060

## Warga dan Wisatawan Tak Perlu Panik Megathrust di DIY Hanya Potensi

YOGYA (KR) - Wilayah pesisir selatan DIY berada pada jalur subduksi akibat pertemuan lempeng IndoAustralia dan Eurasia yang membentang dari barat Sumatera hingga Pulau Timor. Jalur inilah yang dikenal dengan zona megathrust.

Tata letak itu yang membuat DIY berpotensi mengalami kejadian gempa berkekuatan hingga Magnitudo 8,7 dan berpotensi tsunami.

Perlu diketahui, megathrust merupakan patahan dalam laut yang bergerak naik (thrust) dan dikatakan mega karena besar dan membentuk segmen-segmen. Informasi BMKG menyatakan sisi selatan DIY

berpotensi terjadi megathrust hingga magnitudo 8,7 dan bisa menimbulkan tsunami setinggi lebih dari tiga meter.

Plt Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad menyatakan, semua itu hanyalah potensi. Bencana alam seperti gempa sampai sekarang masih menjadi bencana yang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. "Informasi yang disampaikan BMKG itu potensi,

baru hasil kajian, bukan prediksi. Karena sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan kapan itu akan terjadi. Apa besok, atau tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 30 tahun lagi. Memang dari hasil kajian, ada siklus 100 tahunan yang maju mundurnya bisa terjadi di tahun 2023, tapi tetap tidak dipastikan," bebarnya di Yogyakarta, Minggu (20/8).

\* Bersambung hal 7 kol 1

## SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● RABU 9 Agustus 2023, ada tugas laporan untuk peserta didik mengenai kunjungan industri yang telah dilakukan. Ketika ada peserta didik mengeluh capek, saya tampilkan kalimat di layar proyektor: Jika kalian mengeluh capek, bagaimana dengan orang tua yang membiayai sekolah kalian? (Ridwan Mahendra, guru Bahasa Indonesia SMK Kesehatan Mandala Bhakti Surakarta)-f

## Politisi Muda PDI Perjuangan, Eko Suwanto Tegaskan Tujuan Pengelolaan Tata Ruang DIY untuk Wujudkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Bagi Rakyat



DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belakangan ini sedang melakukan pembahasan krusial, tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2023-2043. Raperda ini merupakan usulan Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, dengan beberapa penambahan isian dari RTRW sebelumnya.

Banyak aspek yang dibahas, karena menyangkut realisasi potensi yang ada pada DIY, yang terletak diantara 7.33-8.12 Lintang Selatan dan 110.00- 110.50 Bujur Timur. Dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, luas wilayah DIY hanya 3.185,80 km atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km), atau provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta.

Meski DIY memiliki luas wilayah kecil dibandingkan provinsi lain, namun keberadaannya menjadi bagian penting dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di awal kemerdekaan, DIY yang merupakan penyatuan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman mengantarkan Republik Indonesia tetap terjaga eksistensinya hingga sekarang.

Dalam perjalanannya setelah kemerdekaan RI, DIY tumbuh sebagai daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sehingga saat ini telah berkembang



Eko Suwanto

KR-Istimewa

menjadi pusat budaya, pendidikan dan pariwisata. Dengan integrasi potensi wilayah yang terdiri laut, darat dan udara yang dimiliki, diharapkan berpotensi menghantarkan DIY ke arah yang lebih baik.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW DIY, Eko Suwanto mengungkapkan, semangat dalam penyusunan Raperda RTRW ini bagaimana dalam regulasi penataan ini mampu mengoptimalkan dan menyelaraskan sejumlah potensi tersebut untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. "Wilayah DIY yang bagian dari NKRI ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, DPRD DIY dan Pemda DIY serta masyarakat harus punya komitmen untuk mengelola dan memanfaatkan secara bijak, dengan memperhatikan nilai-nilai keistimewaan DIY dan juga Pancasila," ungkap politisi muda anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam bincang-bincang di Kedaulatan Rakyat (KR), Sabtu (19/8).

Karena menyangkut perencanaan, maka RTRW untuk 20 tahun mendatang, pembahasan di Pansus tidak hanya melibatkan anggota dewan, jajaran Pemda DIY yang terkait, tetapi juga para narasumber yang ahli di bidangnya. "Diskusi dalam

Pansus itu juga menyangkut berbagai kelebihan seperti angka harapan hidup yang besar, indeks kebahagiaan yang tinggi, tetapi juga membahas sejumlah catatan. Sejumlah catatan itu angka kemiskinan masih diangka 11,49%, angka pengangguran 4,06 % dan gini ratio juga masih cukup tinggi. Sejumlah catatan ini yang harus dijawab di kemudian hari," ujar Eko Suwanto yang Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

dengan menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan, pendidikan dan daerah tujuan wisata yang memenuhi standar internasional dengan mengedepankan pula keselarasan ruang darat, laut dan udara, nilai keistimewaan DIY dan ketangguhan bencana dan harmonisasi lingkungan," jelas Eko Suwanto.

### Dengarkan Aspirasi

Dalam pembahasan Raperda, tentunya juga harus mendengarkan aspirasi dari banyak pihak secara terus

lembagaan direspons. Kita juga mendengarkan para pakar para akademisi, para praktisi dengan harapan tata ruang dan wilayah ini tidak saja humanis, tapi juga membawa dampak memakmurkan rakyat," ungkap Eko Suwanto.

Menurut Eko Suwanto, kebijakan RTRW harus memberi ruang bagi semua ekspresi yang ada, termasuk ekspresi sejarah. Karena Yogyakarta punya peran yang sangat besar dalam kemerdekaan republik. Selain itu, juga harus mengantisipasi terkait potensi bencana di DIY. Sejauh ini, DIY kerap terjadi berbagai jenis bencana. Baik hidro-meteorologi, letusan Gunung Merapi, gempa bumi dan berbagai bencana lainnya. Karena itu, rancangan RTRW juga harus memiliki prespektif penanggulangan bencana.

Dari aspek lingkungan hidup juga diperhatikan. Yakni bagaimana RTRW ini memiliki prespektif mencintai lingkungan hidup. Jadi bagaimana merawat sungai, bagaimana merawat pepohonan sehingga lingku-

pusat pendidikan, menjadi daerah tujuan wisata juga telah tumbuh menjadi pusat ekonomi rakyat. Sehingga diharapkan ke depan, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga. Apalagi di DIY banyak masyarakat mengembangkan ekonomi secara mandiri.

Tumbuhnya ekonomi rakyat tersebut, tak bisa dipisahkan dari tumbuhnya pusat budaya, pusat pendidikan dan wisata. Mereka ada yang berusaha di bidang makanan dan minuman, sandang, kos-kosan dan berbagai usaha lainnya. "Nah terkait berbagai potensi tersebut, bagaimana menyelaraskan atau mensinergikannya. Yang jelas, pusat budaya, pendidikan dan pariwisata merupakan jalan untuk mencapai tujuan, masyarakat yang sejahtera," ungkap Eko Suwanto.

Eko Suwanto melihat sebagai pusat kebudayaan, bukan semata diperlihatkan dengan atraksi budaya, tetapi juga dari diri manusianya. Seperti menyatu dengan alam semesta salah satunya budaya gotong-royong. Terbukti budaya go-

kawasan hijau terdapat bangunan hotel. Atau ada hotel yang berada di bantaran sungai, bahkan mepet dengan tebing pantai.

Menurut Ketua Pansus Raperda RTRW DIY, Eko Suwanto, ditemukan ketidaktertibannya menjadi pekerjaan rumah (PR) nantinya. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan dan Pansus mengusulkan ada pasal tentang sanksi. Katagori sanksi pun harus lebih keras, tidak hanya administrasi, denda tetapi juga pidana dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi pelanggar selain mendapatkan sanksi administratif juga disanksi pidana. Harapannya, orang hati-hati dan tidak seenaknya sendiri menyalahgunakan tata ruang. Jangan ada pembiaran lagi, seperti yang terjadi pada penyalahgunaan tanah kas desa," ujarnya.

Disamping itu, aturan itu juga untuk melindungi masyarakat dan juga yang bersangkutan. Terjadi pelanggaran jika dibuat bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW. Pelanggaran itu berarti akan meng-

### PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 2020 - 2022 (C-70-C), (Persen)



Karena itu, dalam penyusunan RTRW harus dapat menjawab sejumlah catatan tadi. Sehingga ketika Raperda RTRW disahkan, maka akan memiliki dampak positif dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraan rakyat DIY.

"Penataan ruang DIY bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan berkeadilan

menerus. Karena itu, Pansus juga menggelar public hearing untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Sedangkan para anggota Pansus mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dari informasi yang masuk.

"Aspirasi dari masyarakat yang masuk baik secara pribadi sebagai anggota pansus maupun secara ke-

ngan tetap hijau. Dan tentunya menjadi misi besar adalah mengurangi polusi udara, menekan peningkatan suhu, agar temperature udara di Yogyakarta yang panas ini bisa turun.

"Seperti kota Surabaya yang berhasil menurunkan panas udara sampai 2 derajat celcius," ujarnya. Dijelaskan pula bahwa, DIY selain sebagai pusat budaya,



Wilayah DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota

tong royong berperan penting dalam kebangkitan pasca-Gempa Bumi tahun 2006.

### Melanggar, Bakal Ada Sanksi Pidana

Potensi tidak tertib alam penegakan aturan menjadi perhatian dalam diskusi Raperda RTRW DIY 2023-2043. Dalam pelaksanaan Perda RTRW DIY yang sedang berjalan, dari total 100% tata ruang wilayah ini, ada 5% yang tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya

ganggu kehidupan lainnya. "Contohnya, restoran menempel ke sepadan pantai. Mereka lupa satu hal bahwa ada potensi bencana baik itu longsor maupun potensi tsunami. Sehingga kenapa kemudian diatur agar agak jauh dari bibir pantai itu sejatinya untuk keselamatan kita jangan sampai nanti kalau ada ombak tinggi, kemudian menghantam mereka, terus menyalahkan ke pemerintah," jelas Eko Suwanto. (\*)

Simak juga wawancara di :

krjogja.com



krjogja.com



Kedaulatan Rakyat @Krijogdotcom



TikTok Kedaulatan rakyat Media



YouTube Kedaulatan Rakyat TV